

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana, (Kasmir, 2011: 4)

Tersedianya jasa perbankan yang lengkap sangat penting bagi setiap individu dan masyarakat pada suatu negara, karena bank adalah urat nadi perekonomian dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir. Bank juga merupakan terjadinya transaksi-transaksi usaha yang memperlancar jalannya lalu lintas perekonomian. Meningkatnya kegiatan dunia perbankan ini juga tercermin dengan banyaknya fasilitas-fasilitas baru yang disediakan oleh suatu bank. Meskipun demikian, inti dari suatu usaha bank tetaplah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dengan memberikan kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana untuk kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta fasilitas jasa-jasa bank lainnya akan menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya

dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Kumala Dewi (2011) mengatakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya, (Dewi, 2012: 3).

Kegiatan perkreditan merupakan bagian dari pendapatan yang dominan. Persaingan antar bank menjadi lebih ketat seperti sekarang ini dan kebutuhan penanaman modal semakin terasa. Sebagai pimpinan bank tentunya tidak ingin bank yang dipimpinnya mengalami kemacetan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka cara yang ditempuh adalah dengan menarik dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk lain. Investor tertarik dengan bank yang mempunyai perputaran uang yang stabil untuk itu bank berlomba-lomba menyalurkan kredit kepada masyarakat, namun seringkali bank mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau biasa disebut sebagai kredit macet, artinya uang yang dipinjam mengalami kemacetan dalam penagihan sehingga likuiditas bank bisa terancam karena kredit yang macet, (Kumala Dewi, 2011: 5)

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut, (Dewi, 2012: 2). Kumala Dewi (2011) juga Mengatakan untuk mencegah terjadinya kredit macet tersebut maka diperlukan pengamanan atau pembinaan terhadap kredit yang diberikan. Masalah-masalah yang dihadapi bank dalam pemberian kredit tidak hanya disebabkan oleh kelalaian saja, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai bank yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu didukung dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit yang memadai.

Menurut Coso dalam Jusup (2010: 252) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan.

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, (Munawaroh, 2011: 76). Menurut Sutojo (2008: 235) dikatakan bahwa untuk menunjang keberhasilan program pengawasan kredit, bank harus mempunyai sistem pengendalian intern yang cukup memadai. Sistem pengendalian intern kredit tersebut harus dapat diharapkan dalam semua tahap proses penyaluran kredit, mulai dari saat permintaan kredit diajukan oleh debitur sampai saat kredit dibayar lunas.

Tujuan pengendalian intern menurut Sutojo (2008: 235) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern juga harus memberikan kemungkinan untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran atas kebijaksanaan pokok penyaluran kredit dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit. Dengan terselenggara-nya pengendalian internal yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit, terutama akibat lemahnya pengendalian internal.

Penelitian dari Handayani (2010) sebagaimana dilakukan pada PT Bank Nasional Indonesia Tbk Surabaya dalam penelitiannya membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya telah sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif. Penelitian Munawaroh (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI), Kediri, dan sistem pengendalian internal tersebut telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal sebesar 93,75%. Penelitian Kumala Dewi (2011) dengan judul pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kualitas kredit bank perkreditan rakyat (bpr) di kota pati. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas kredit atau NPL (non performing loan).

Fenomena yang dapat dilihat dalam pemberian kredit adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya

sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank.

Tiga tahun terakhir ini banyak perusahaan yang menyediakan pinjaman modal usaha, termasuk juga perusahaan perbankan, salah satu diantara bank yang menyediakan pinjaman modal adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bank BRI memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha. Bentuk pinjaman modal di BRI ini dinamakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR adalah Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.

Namun pelaksanaan kredit usaha rakyat ini yang telah dilaksanakan oleh BRI tidak berjalan lancar dan terdapat hambatan/kendala-kendala di lapangan, diantaranya yaitu kredit macet. Faktor faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank BRI terjadi karena kurang efektifnya sistem pengendalian intern pada Bank tersebut, dimana dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Selain lembaga keuangan itu sendiri, Pihak nasabah juga mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. Masalah lain juga datang dari nasabah itu sendiri, nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank/ lembaga keuangan sehingga kredit yang diberikan macet dan adanya unsur tidak sengaja dimana debitor mau membayar akan tetapi tidak mampu. Misalnya kredit

yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) yang telah dilaksanakan oleh BRI tidak berjalan lancar dan terdapat hambatan/kendala-kendala di lapangan, diantaranya yaitu kredit macet. Faktor faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank BRI terjadi karena kurang efektifnya sistem pengendalian intern pada Bank tersebut, dimana dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
2. Masalah lain juga datang dari nasabah itu sendiri nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank/ sehingga kredit yang diberikan macet dan adanya unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis dan untuk lebih mempermudah dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah adalah apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Limboto.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Indonesia Cabang Limboto.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit dapat lebih efektif.

